

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada mulanya *Good Corporate Governance* dilatarbelakangi oleh Negara Amerika dan Inggris pada tahun 1980-an yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Negara tersebut masalah dan krisis besar dimana ada tindakan yang mementingkan pihak-pihak tertentu (Marsela, Lusiana, 2013). Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada akhir tahun 2004 yang mengatakankan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) salah satu pilar sistem dari ekonomi pasar, *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (KNKG dalam Diah Kusuma Wardani, 2008:7).

Berdasarkan Pasal 43 ayat 910 s.d. (4) dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, pada Bab XI Program Pengenalan BUMN, antara lain menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMN yang bersangkutan.

Program pengenalan tersebut merupakan tanggung jawab dari sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan (Effendi, 2016: 41).

*Good Corporate Governance* di Indonesia masih tergolong rendah. Walaupun saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk melaksanakan GCG, namun baru sebatas pada pemenuhan tuntutan bisnis. Pada kenyataannya sistem governansi belum dijalankan secara maksimal. Perusahaan menjalankan praktik GCG masih sebatas pada pemenuhan terhadap berbagai peraturan (Hamdani, 2016:5-6).

*Good Corporate Governance* dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. Dengan demikian, sejalan dengan pemikiran ini, BUMN juga semestinya mampu mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance*. Akan tetapi, dalam kenyataannya BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya kurang begitu memperhatikan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

*Good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, Komisari/Dewan pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*

lainnya, berlandaskan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Adrian Sutedi 2012:01). Oleh karena itu jika kondisi *Good Corporate Governance* dapat dicapai maka akan menciptakan Negara yang bersih *resvonsive* yaitu Negara yang berish dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yaitu sistem tata kelola perusahaan yang bertujuan meningkatkan laba perusahaaan dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti kreditur, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

*Good Corporate Governance* merupakan Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya". (Sukrisno Agoes 2013:101).

*Good Corporate Governance* akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis dan masih berlanjut sampai saat ini. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukan rendahnya mutu praktik *Good Corporate Governance* di Negara kita.

Berikut adalah beberapa fenomena tentang *Good Corporate Governance*:

**Tabel 1.1**

**Fenomena *Good Corporate Governance* pada BUMN :**

Kriteria	Sumber	Fenomena
<p>1. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas hak Karyawan.</p>	<p>Diposting :            Jumat, 03 Juli            2015, 09.18 WIB</p> <p>Web :  <a href="https://daerah.sindo-news.com/read/1019664/151/demo-karyawan-pt-inti-tuntut-pembayaran-gaji-juni-1435889861">https://daerah.sindo-news.com/read/1019664/151/demo-karyawan-pt-inti-tuntut-pembayaran-gaji-juni-1435889861</a></p>	<p>Sekitar 500 Karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT InTI) menggelar aksi demonstrasi di pelataran gedung PT InTI.</p> <p>Mereka menuntut pembayaran gaji juni yang belum turun hingga awal juni ini. Selain mempersoalkan keterlambatan pembayaran Gaji juni, pekerja BUMN itu juga mengajukan poin tuntutan lainnya.</p> <p>Gaji yang biasanya dibayarkan setiap tanggal 25, mengalami keterlambatan hingga akhir bulan. Puncaknya, hari ini para karyawan melakukan aksi demo yang berisi pemenuhan hak dasar berupa gaji, pembayaran THR,</p>

		<p>uang pensiun, dan cuti.</p> <p>“Kami sudah sejak Januari (gaji) telat terus. Hari ini puncaknya, karena bulan ini belum gajian. Ini loh karyawan belum gajian, kami juga butuh buat makan,”kata dia. Peserta demo lainnya tak kalah lantang bersuara. Dia menduga, ada mafia di kalangan petinggi perusahaan. Dia mengaku dipaksa pindah divisi saat menagih dana SPJ pada proyek PLTS November 2014 silam. “Saya bukan nuntut kenaikan gaji, saya hanya menuntut hak saya,” ujarnya.</p>
--	--	--

	<p>Diposting : 12-12-2017, 10.23 WIB WEB : <a href="https://nasional.kompas.com/read/2017/12/12/10233911/diduga-ada-penyimpangan-pembagian-bonus-pt-pos-dilaporkan-ke-kejaksaan">https://nasional.kompas.com/read/2017/12/12/10233911/diduga-ada-penyimpangan-pembagian-bonus-pt-pos-dilaporkan-ke-kejaksaan</a></p>	<p>Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, diduga ada penyimpangan pemberian tantiem atau bonus kepada direksi dan komisaris PT Pos Indonesia tahun 2017 padahal perusahaan dalam keadaan merugi.</p> <p>"Terdapat upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan mengalami keuntungan dengan cara penjualan aset berupa saham di Bank Mantap (Bank Mandiri Taspen Pos)," ujar Boyamin melalui keterangan tertulis, Selasa (12/12/2017).</p> <p>Boyamin mengatakan, PT Pos Indonesia memberi uang sebesar Rp 5.359.000.000 kepada Direksi dan Komisaris perusahaan pada 2017. Dalam tahun yang sama, PT Pos Indonesia dinyatakan merugi berdasarkan neraca pembukuan keuangan perusahaan tahun 2017.</p>
--	--	---

		<p>"Pemberian tantiem pada saat perusahaan merugi dapat dikategorikan merugikan negara yang mengarah ketindak pidana korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 5.359.000.000," kata Boyamin.</p> <p>Terlebih lagi, tantiem diberikan setelah menjual aset berupa saham di Bank Mantap sebesar Rp 324,61 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 200 miliar dimasukkan sebagai pendapatan. "Semestinya seluruh penjualan aset saham tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan yang menjadikan keuntungan," kata Boyamin.</p>
--	--	---

Berdasarkan fenomena yang ada pada tabel 1.1, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya, pada fenomena pertama perusahaan tidak bertanggungjawab atas hak yang harus didapatkan oleh karyawan, seharusnya gaji karyawan dibayarkan pada tanggal 25 mengalami keterlambatan sampai awal bulan. Hal ini mencerminkan bawah Sistem Pengendalian Internal pada PT INTI

masih kurang memadai karena masih terdapat permasalahan dalam hal pengendalian internal khususnya pengendalian internal pada penggajian. Selain sistem pengendalian internal pada penggajian masih belum memadai PT Inti Persero melanggar prinsip *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yaitu pengelolaan perusahaan tidak memperhatikan masyarakat luas. Sedangkan pada fenomena yang kedua perusahaan PT Pos Indonesia melanggar Prinsip GCG yaitu *Fairness* dimana terdapat beberapa pihak yang telah merugikan public dengan mementingkan kepentingan dan keuntungan perusahaan dengan melakukan dengan melakukan merekayasa laporan keuangan. Buruknya Implementasi *Good Corporate Governance* yaitu dikarenakan pihak-pihak yang melakukan internal control mulai dari Dewan Komisaris, Internal audit dan Komite audit tidak melakukan Fungsinya dengan optimal. Hal ini sangat disayangkan mengingat GCG merupakan alat control yang menciptakan *checks and balance* yang digunakan dalam pengawasan pengelolaan perusahaan.

Menurut Tjager dkk. (2003) dalam sela (2012) mengemukakan bahwa salah satu unsur *Good Corporate Governance* adalah audit Internal. Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada pihak lain yaitu audit internal yang berada pada divisi Satuan Pengawasan Internal.



Audit internal merupakan penilaian bebas, di persiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini mengaudit dan menilai efektifitas kegiatan unit yang lain. The institute of Internal Auditors (IIA) telah mendefinisikan audit internal sebagai berikut:

*“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.”*

Audit internal merupakan aktivitas yang independen, penilaian objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal dilakukan secara independen dan objektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam pelaksanaan audit. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2013-203) menjelaskan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain.

Selain Audit Internal yang menjadikan unsur penerapan *Good Corporate Governance* adalah pengendalian internal. Menurut Tuanakotta (2014:126) pengendalian internal adalah :

“Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) dalam Sukrisno Agoes (2013: 100) ;

*”Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.*

yang memiliki arti pengendalian internal adalah sebuah proses, dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Untuk itu, demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus melalui sebuah sistem yang di desain untuk mengarahkan, dan mengedalikan dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Menurut Tuanakotta (2014) pengendalian internal akan berjalan efektif manakalah komponen inti pengendalian internal diterapkan secara baik dan benar dalam organisasi guna memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan urain diatas pengendalian internal harus dilakukan dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui sebuah sistem yang didesain

sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan baik dan benar. Hal ini perlu dilakukan, karena dapat mengurangi tingkat kecurangan diantaranya penyalahgunaan wewenang dan melakukan penyajian laporan keuangan yang salah. Ini juga berarti pengendalian internal secara efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan adanya kecurangan.

Penelitian terdahulu oleh Gumilang (2009) dengan judul Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*. Dengan menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan kemandirian maka semua variabel *good corporate governance* dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya gumilang (2009) yang berjudul “Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan”.

Tujuan utama penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan variabel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu oleh Gumilang variabel bebas (*Independent Variabel*) yang digunakan adalah pengaruh audit internal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal dan perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terdapat perbedaan tempat pada perusahaan yang diteliti. Penulis

sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertempat pada Perusahaan BUMN di Kota Bandung yaitu PT INTI DAN PT POS INDONESIA.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH AUDIT INTERNAL, DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT INTI DAN PT POS INDONESIA PERUSAHAAN BUMN DI KOTA BANDUNG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Audit Internal pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Internal pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
3. Bagaimana implementasi *good corporate governance* (GCG) pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
4. Seberapa Besar Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governace* pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung.
5. Seberapa Besar Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal

terhadap *Good Corporate Governance* PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung

6. Seberapa besar pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Audit Internal pada PT INTI dan PT Pos Inodnesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Internal pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
3. Untuk mengetahuin bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governace* pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya Besar Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT INTI dan PT Pos Indonesia Perusahaan BUMN di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis tentunya berharap berguna baik untuk peneliti sendiri maupun memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah Audit khususnya Audit Internal, Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*, selain itu juga sebagai penulis untuk menyumbangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan yang berkaitan dengan judul yang penulis buat.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran atau pemasukan dan tambahan informasi bagi beberapa BUMN di Kota Bandung khususnya mengenai pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang Audit Internal yang sama yaitu mengenai pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*.

### 4. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa/pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi.

## 1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan Audit Internal, khususnya mengenai pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*.

## 1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Perusahaan BUMN di Kota Bandung Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:









